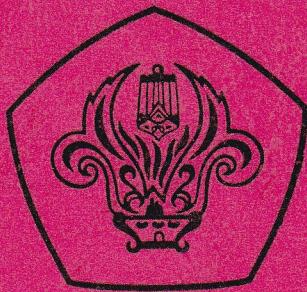


B.39

LAPORAN PENELITIAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH
UNIVERSITAS TARUMANAGARA



**EFEKTIFITAS SISTEM PENGAWASAN BUMD DALAM PENERAPAN TATA
KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE-GCG*)
KOTAMADYA KUPANG**

Disusun oleh: Ketua Pelaksana: Dr Ahmad Sudiro,SH.,MH.,MM
Anggota: Prof Dr Jeane Neltje Saly,SH.,MH.,APU

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

2017

Halaman Pengesahan

1. Judul Penelitian :

Efektifitas Sistem Pengawasan BUMD dalam Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance-Gcg*) Kotamadya Kupang

2. Ketua Peneliti

- | | | |
|-----------------------|---|------------------------------------|
| a. Nama lengkap | : | Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M. |
| b. Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
| c. | : | |
| d. NIP | : | 10290010 |
| e. Jabatan Struktural | : | Dekan Fakultas Hukum |
| f. Jabatan Fungsional | : | Dosen |
| g. fakultas/Jurusan | : | Ilmu Hukum |
| h. email | : | ahmads@fh.untar.ac.id |

4. Jangka Waktu Penelitian : 6 (enam) bulan

5. Pembiayaan :

- | | |
|---|------------------|
| a. jumlah biaya yang dibiayai oleh LPPI | Rp 40.000,000 |
| b. jumlah biaya tahun ke 1 | |
| - biaya tahap ke 1 dari LPPI | Rp 19.820.000,00 |
| - biaya tahap ke 2 dari LPPI | Rp 19.820.000,00 |

Jakarta, Desember 2017

Mengetahui,

Wakil Dekan FH UNTAR

Mia Hadiati, SH, MH
NIP. 10214003



Ketua Penelitian

Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M.
NIP. 10290010

Menyetujui
Direktur Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Ir. Jap Tji Beng, MMSt, Ph.D
NIP. 100381047



A. LAPORAN HASIL PENELITIAN

RINGKASAN

Efektifitas sistem pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terus ditingkatkan guna mencapai hasil yang optimal dalam pelaksanaan pelayanannya, merupakan salah satu cara dalam mendorong Pemerintah Daerah menunjang ekonomi wilayahnya guna mensejahterakan masyarakat, sebagai implementasi dari Pasal 28 undang Undang Dasar 1945 (UUD 45) Perwujudannya melalui pemupukan sumber pendapatan daerah dengan tanpa membebani masyarakat, tetapi membuka peluang usaha yang berbasiskan ekonomi daerah yang selaras dengan potensi daerah melalui Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance-GCG*, seperti Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Air Minum (BUMD PDAM) di Kota Madya Kupang.

Permasalahan yang menjadi fokus perhatian ini adalah: Pertama, Apa dan bagaimana efektifitas pengawasan BUMD di Kota Madya Kupang sesuai Prinsip Tata kelola Perusahaan Yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2014 (UU No. 23/2004 tentang Otonomi Daerah); dan Kedua,Apa hambatan, dan upaya pemerintah pada pelaksanaan pengawasan BUMD dalam mencapai tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*)

Bermanfaat secara teoritis sebagai pendukung pembentukan dan pengembangan hukum, dan secara praktis sebagai bahan masukan bagi para pemangku kepentingan antara lain Pemerintah, Pusat dan Daerah, para ahli, akademisi, praktisi dan masyarakat dalam kaitan dengan efektivitas sistem pengawasan BUMD, khususnya di Kota Madya Kupang

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif., namun guna mendukung data penelitian, maka digunakan pula pendukung melalui penelitian empiris yang bermanfaat untuk memperoleh fakta empirik di lapangan, sebagai data yang mendukung efektifitas sistem pengawasan BUMD PDAM di Kupang

Hasil penelitian adalah Efektifitas sistem pengawasan BUMD di Kota Madya Kupang dilakukan dalam pelaksanaan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah menggantikan UU No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. BUMD merupakan istilah menggantikan istilah Perusahaan Daerah saat ditetapkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1990 tentang Perubahan Bentuk BUMD ke Dalam Dua Bentuk Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) atau Perusahaan Perseroan Daerah (PERSERO DA), Namun, instruksi tersebut tidak diikuti terbitnya peraturan pelaksana pengelolaan BUMD dengan bentuk yang baru.

Hambatan Efektifitas sistem pengawasan BUMD saat ini khususnya di Kota Madya Kupang adalah dalam praktek diatur pada berbagai peraturan perundang-undangan, yang isinya tidak sinkron satu dengan lainnya, sehingga dalam mencapai tujuan dilakukannya efektifitas sistem pengawasan belum mencapai optimal sesuai tujuannya untuk memberikan sumbangan pada pembangunan Daerah, dan hanya berupa pemasukan pajak kepada Negara. Pemerintah nerupaya untuk adanya kesadaran dan peningkatan komitmen Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsinya agar dalam memilih Anggota Dewan Pengawas secara obyektif. Professional guna dapat menunjang pembangunan ekonomi Kurangnya komitmen Pemerintah Daerah berupaya melakukan sosialisasi agar masyarakat memahami manfaat air bersih bagi kesehatannya.

Kata Konci: BUMD, Sistem Pengawasan, dan *Good Corporate Governance*

SUMMARY

The effectiveness of the supervision system of Regional Owned Enterprises (BUMD) is continuously improved in order to achieve optimal results in the implementation of its services, is one of the ways in encouraging Regional Government to support the regional economy for the welfare of society, as the implementation of Article 28 of the 1945 Constitution (UUD 45) through the fostering of local revenue sources without burdening the community, but opening up regional-based business opportunities that are aligned with regional potentials through Good Corporate Governance (GCG), such as Regional Owned Enterprises of Regional Water Company (BUMD PDAM) in Kupang City

The issues that become the focus of this attention are: Firstly, what and how the effectiveness of BUMD supervision in Kupang City in accordance with the Good Corporate Governance Principles in implementing of Act No. 23 of the year 2014 on Local Government (UU No. 23/2014) and Second, What are the obstacles, and the government's efforts on the implementation of BUMD supervision in achieving Good Corporate Governance

Theoretically useful as a supporter for the formation and development of law, and practically as an input for stakeholders such as Government, Central and Regional Government, experts, academicians, practitioners and the community in relation to the effectiveness of BUMD supervision system especially in Kupang Kota

This law research is a normative legal research, but to support the research data, it is also used support through empirical research that is beneficial to obtain empirical facts on the ground, as the data that supports the effectiveness of surveillance systems in Kupang PDAM enterprises. The result of this research is the effectiveness of BUMD supervision system in Kota Kupang Kupang done in the implementation of of Act No. 23 of 2014 on Local Government replacing Law no. 5 of 1962 concerning Regional Companies. BUMD is a term replacing the term Regional Enterprise when the issuance of Instruction of the Minister of Home Affairs. 5 Year 1990 on the Change of Shape of BUMD into Two Form of Regional General Company (PERUMDA) or Regional Company Company (PERSERO DA), However, the instruction is not followed by the issuing of management regulation of BUMD with new form.

Obstacles The effectiveness of BUMD supervision system especially in Kupang City is in practice regulated in various laws and regulations, whose content is not synchronized with each other, so that in achieving the purpose of the effectiveness of the supervision system has not reached the optimal according to its purpose to contribute to regional development , and only in the form of tax income to the State. The Government strives for awareness and enhancement of the commitment of the Regional Government in carrying out its functions in order to elect the Members of the Board of Trustees objectively. Professional in order to support economic development Lack of commitment Local Government seeks to socialize so that people understand the benefits of clean water for health.

Keywords: BUMD, Supervision System, and Good Corporate Governance

PRAKATA

Puji syukur atas pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat dan rachmatnya, penelitian dapat dilaksanakan dengan baik. Sebagai salah satu pilar Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Penelitian ini diselenggarakan oleh Fakultas Hukum bekerjasama dengan Lembaga Penelitian Dan Publikasi Ilmiah Universitas Tarumanagara mengadakan penelitian ini.

Para peneliti menyadari terselesaikannya penelitian ini adalah atas kesempatan dan pertuan para pihak. Dalam hubungan itu, maka dalam kesempatan ini Tim Peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof Agustinus, Ph.D beserta Jajarannya
 2. Ir Yap Tji Beng, MMSI Ph.D selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Publikasi Ilmmiah
 3. Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Madya Kupang
- Serta tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang ikut membantu penyelesaian penelitian ini.

Kami menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam jasal penelitian ini. Oleh karena itu kami akan menerima masukan guna memperbaiki hasil penelitian ini. Harapan kami hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pihak terkait.

Jakarta, Desember 2017

Ketua Tim



Dr. Ahmad Sudiro, SH.,MH.,MM

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	i
RINGKASAN	ii
SUMMARY	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	v
A. LAPORAN HASIL PENELITIAN	
RINGKASAN DAN SUMMARY	ii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI LAMPIRAN	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	8
BAB II KERANGKA TEORITIS	
A. Teori Efektifitas	9
B. Teori Pengawasan	11
C. Teori Pembangunan Hukum	17
BAB III METODE PENELITIAN	21
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Landasan Hukum	24
B. Sistem Pengawasan	66
C. Hambatan Dan Upaya	79
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	105
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya mengatasi problematik pelaksanaan penerapan bidang ekonomi melalui pengawasan secara efektif, antara lain terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMD) dalam mencapai tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*, merupakan salah satu kendala dalam era otonomi daerah dimana Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam mengatur beberapa aspek kehidupan di daerahnya, antara lain aspek ekonomi yang dalam, penelitian ini adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMD), yang berbeda dengan BUMN

Tak jauh berbeda dengan Indonesia, beberapa negara di luar negeri juga memiliki perusahaan BUMN-nya sendiri, misalnya Amerika Serikat. Perusahaan milik negara dikuasa ini sering disebut dengan istilah *Government Sponsored Enterprise* (GSE). BUMN atau Badan Usaha Milik Negara adalah perusahaan yang dibentuk dan dimiliki pemerintah Indonesia.

Jenis badan usaha ini digolongkan milik negara karena sifat permodalannya. Modal tersebut merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Pemerintah juga berperan sebagai pemegang saham. Adapun besar saham perusahaan yang dimiliki negara minimal adalah 51 persen dan sisanya boleh dimiliki masyarakat.

Sedikit berbeda dengan BUMN Indonesia, *Government Sponsored Enterprise* (GSE), sebutan untuk BUMN di Amerika Serikat, adalah termasuk perusahaan swasta. Perusahaan ini dibuat dan disetujui oleh Kongres Amerika Serikat. GSE disewakan oleh Pemerintah Federal untuk tujuan kebijakan publik. Berbeda dengan BUMN yang berperan agar pihak swasta tidak memonopoli usaha yang berkenaan dengan hajat hidup rakyat, GSE sendiri justru termasuk perusahaan swasta sehingga tidak termasuk dalam anggaran Federal. Efek atau sekuritas mereka tidak didukung penuh oleh kredit dari